

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Sidoarjo. Alasannya, karena terdapat kesamaan kondisi keduanya yaitu dampak bencana alam yang mengakibatkan penduduk harus mengungsi atau direkolasi ditempat yang baru. Dari jenis bencananya, terdapat perbedaan antara bencana yang diakibatkan erupsi Gunung Sinabung dengan dengan semburan lumpur Sidoarjo.

Yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana KPU Kabupaten Karo dan Sidoarjo memberi jaminan hak pilih kepada pengungsi/ korban bencana pada pemilu legislatif 2014. Selain itu apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemilu di daerah bencana.

Penelitian ini dilakukan dengan *description research*. Sedangkan analisis data terdiri dari tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian, KPU Kabupaten Karo maupun Sidoarjo dalam menjamin hak pilih korban melalui dua langkah. *Pertama*, langkah yang tidak terkait dengan tahapan yaitu melakukan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi. *Kedua*, langkah yang terkait dengan tahapan yang berfokus pada tahapan penataan daerah pemilihan, pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, dan pemungutan suara.

KPU Kabupaten Karo lebih menitikberatkan pada upaya memindahkan lokasi TPS ke tempat Pengungsian atau tempat strategis lainnya. Sedangkan KPU Kabupaten Sidorajo lebih menitikberatkan pada proses pencatatan pemilih korban lumpur ke dalam DPT di wilayah domisili mereka saat itu dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili.

Hambatan terbesar yang dihadapi kedua satker tesebut adalah pada proses pemutahiran data pemilih dan validasi data korban bencana serta penduduk tidak terdeteksi keberadaanya.

Rekomendasi yang disarankan adalah penyusunan regulasi pemilu yang *responsive* terhadap bencana, ketentuan yang mengatur hubungan antar *stakeholder*, penerapan Sistem Manajemen Risiko (*SiMeri*) guna menyusun perencanaan yang lebih akurat. Semua hal ini sebagai upaya untuk menjamin hak pilih korban bencana alam.

Key word: Pemilu, pemilu di daerah bencana

ABSTRACT

This study was conducted in two locations, namely Karo Regency and Sidoarjo Regency. The reason is, because there are similarities both conditions that the impact of natural disasters resulted in the population must be displaced or reclaimed in a new place. From the type of disaster, there is a difference between the disaster caused by eruption of Mount Sinabung with Sidoarjo mudflow.

What we want to know in this study is how KPU of Karo and Sidoarjo Regency give guarantee of voting rights to refugees / victims of disaster in legislative election 2014. Besides what are the obstacles in conducting election in disaster area.

This study was done by description research. While data analysis consisted of three things, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the result of study, KPU of Karo Regency and Sidoarjo in ensuring victim suffrage through two steps. First, the step that was not related to the stage of coordination, consolidation and consultation. Second, the step was related to stages that focused on the stages of electoral area management, data updating and the compilation of voter lists, campaigns and voting.

KPU of Karo Regency is more focused on efforts to move the location of TPS to the refuge or other strategic places. While KPU of Sidoarjo Regency is more emphasis on the process of recording voters and victims into the DPT in their domicile area at that time by using the Certificate of Domicile.

The biggest obstacles faced by both satker are the process of updating the data of voters and validating the data of disaster victims and the undetected population.

Recommendations suggested are the preparation of electoral regulations that are responsive to disasters, the provisions governing relationships among stakeholders, the application of the Risk Minster System (SiMeri) in order to prepare more accurate planning. All these things are in an effort to guarantee the right of victims of natural disasters.

Keywords: Election, Election in Disaster Areas